

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LANGKA PADA MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk)

Oleh :

Daffa Haikal Ramadhan

Tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial merupakan tindak pidana yang semakin marak terjadi. Walaupun terdapat peraturan perundang undangan yang mengatur perlindungan terhadap satwa langka, tetapi masih banyak oknum yang melakukan tindak pidana tersebut dengan berbagai macam alasan. Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial serta faktor apa yang menjadi penghambat penegakan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Proses pengolahan data dengan seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Data dianalisis secara kualitatif, berarti data akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Perolehan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan menunjukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial dilakukan melalui tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi dilakukan dengan pelaksanaan putusan oleh pengadilan.

Daffa Haikal Ramadhan

Serta faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial yang dirasa dominan adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih memahami tentang hukum konservasi dan modus digital yang berkembang, sarana dan prasarana yang terpenuhi guna mengoptimalkan proses penegakan hukum. Serta kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, akademisi, dan platform media sosial melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai peraturan konservasi, jenis-jenis satwa yang dilindungi, ancaman pidana bagi pelanggarnya, serta dampak ekologis yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Satwa, Media Sosial

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF RARE ANIMAL TRADE ON SOCIAL MEDIA

(Study of Decision Number 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk)

By:

Daffa Haikal Ramadhan

The crime of rare animal trade in the media is a crime that is increasingly prevalent. Although there are laws and regulations governing the protection of endangered animals, there are still many people who commit such crimes for various reasons. Decision Number 217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk shows that the Defendant was found guilty and sentenced to 6 (six) months imprisonment and a fine of Rp5,000,000.00 (five million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by 1 (one) month imprisonment. The problem in this study is how law enforcement against the crime of rare animal trade on social media and what factors hinder the enforcement of the crime of rare animal trade on social media.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection is done by interview and literature study. Data processing is done by data selection, data classification, and data preparation. The data is analyzed qualitatively, meaning that the data will be described in the form of sentences arranged systematically, clearly and in detail which are then interpreted to obtain a conclusion. Conclusions are drawn using the inductive method, which describes specific matters and then draws general conclusions.

Based on the results of the conclusion and discussion, it shows that law enforcement against the crime of rare animal trade on social media is carried out through the formulation stage, the application stage, and the execution stage is carried out by the implementation of the decision by the court. As well as factors that hinder law enforcement against rare animal trade crimes on social media which are considered dominant are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors.

Daffa Haikal Ramadhan

Suggestions from this research are that law enforcement officers are expected to better understand conservation law and the growing digital mode, facilities and infrastructure that are fulfilled to optimize the law enforcement process. As well as cooperation between the government, law enforcement officials, NGOs, academics, and social media platforms to conduct socialization and legal counseling to the public regarding conservation regulations, types of protected animals, criminal threats for violators, and the ecological impacts caused.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Animal Trafficking, Social Media